



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
DAN PERTANAHAN**

JALAN SULTAN ALAM BAGAGARSYAH PAGARUYUNG TANJUNG EMAS
TANAH DATAR SUMATERA BARAT



**Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 telah dapat diselesaikan.

Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen, dasar monitoring, evaluasi dan supervisi.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) akan menjadi acuan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dalam menyusun Program dan Kegiatan serta penetapan target kinerja di Tahun berikutnya.

Demikianlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dibuat, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih.

Batusangkar, Maret 2026
Kepala Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Datar



MUSTIKA SUARMAN, ST, MT
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 197605062002121005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	
Daftar Isi	
IKHTISAR EKSEKUTIF	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	3
A. Peran Strategis Dalam Pembangunan Daerah.....	7
B. Sistematika Laporan.....	8
Bab II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis.....	10
B. Priorotas Daerah.....	12
C. Perjanjian Kinerja.....	18
D. Rencana Kerja dan Anggaran.....	19
Bab III AKUNTABIITAS KINERJA	
A. Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja.....	27
B. Analisis Capaian Kinerja.....	34
C. Akuntabilitas Keuangan/Realisasi Anggaran.....	50
Bab PENUTUP	
IB	
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2025 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan pada tahun 2025 memiliki 9 (sembilan) sasaran strategis dengan 11 indikator kinerja, 11 (sebelas) target kinerja yang harus dicapai.

Dari hasil pengukuran realisasi terhadap 11 (sepuluh) target tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 1 target;
- 2) Target dengan capaian realiasi tepat 100% sebanyak 4 target;
- 3) Target dengan capaian realiasi di bawah 100% sebanyak 6 target

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja pada masing-masing Sasaran Strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
			(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	69,99	60,30	86,15
2	Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi	Persentase Luas Areal Irigasi Dalam Kondisi Baik	60,74	45,67	75,19
		Persentase ketersediaan air irigasi	70,00	70,00	100
3	Meningkatnya cakupan pelayanan air minum	Akses Rumah Tangga terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan (%) (%)	27,25	21,10	77,43
4	Meningkatnya kuantitas jaringan sanitasi	Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman (Angka)	6,15	5,10	82,93
5	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukannya	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukannya	90,00	90,00	100

6	Meningkatnya pengamanan aset tanah Pemda	Persentase tanah asset Pemda Yang bersertifikat	42,80	43	100,47%
7	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	BB (70,10)	BB (70,25)	100,21
8	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat			100
9	Terwujudnya inovasi berkelanjutan	Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan			85,51
		Realisasi Perolehan Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi/Jalan/Irigasi	Rp6.191.640.000	Rp3.504.723.000	100
	Tingkat Capaian Rata Rata				

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Datar dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan. Adapun fungsi Dinas Pekerjaan Umum adalah :

- a. penyusunan perencanaan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
- d. pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan pertanahan;
- e. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
- f. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

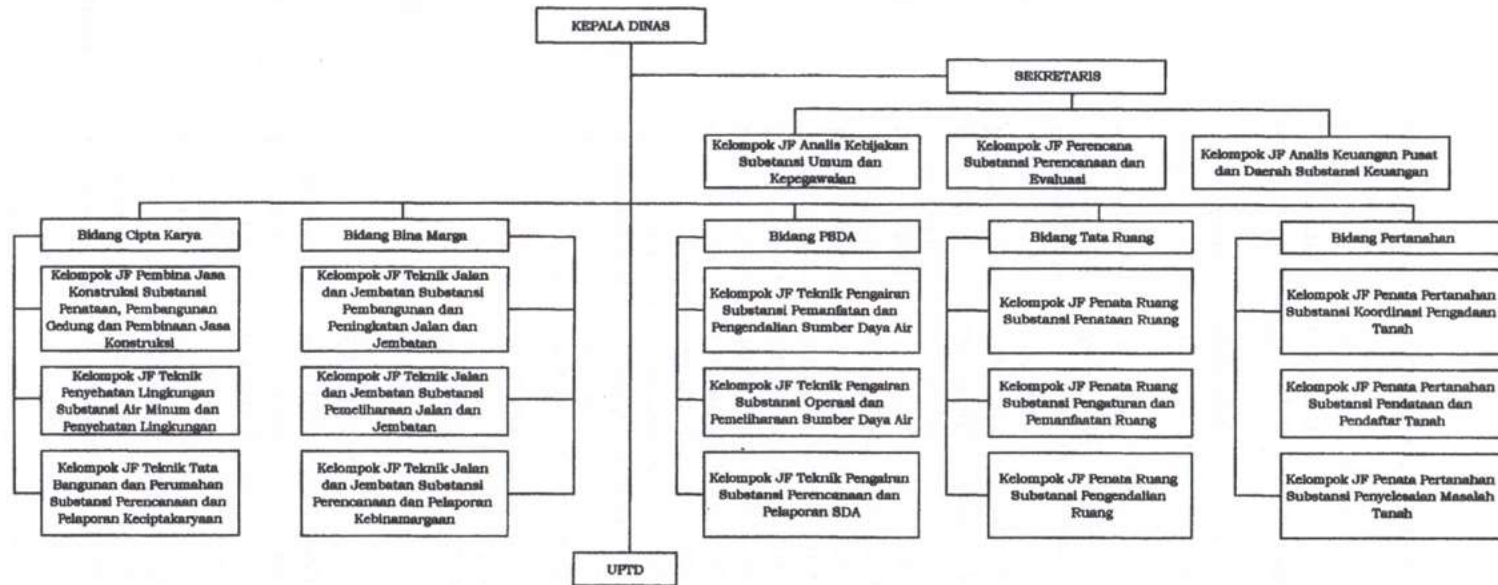
Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 63 Tahun 2021. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Datar adalah sebagai berikut :

1. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Dinas terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan 5 (lima) Bidang, yaitu Bidang Cipta Karya, Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, Bidang Tata Ruang dan Pertanahan
2. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi, yaitu :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Substansi Umum dan Kepegawaian
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Perencana Substansi Perencanaan dan Evaluasi
 - c. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Substansi Keuangan
3. Bidang Cipta Karya terdiri atas :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Pembina jasa konstruksi substansi penataan, pembangunan gedung dan pembinaan jasa konstruksi
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan lingkungan substansi air minum dan penyehatan lingkungan
 - c. Kelompok jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan perumahan substansi perencanaan dan pelaporan keciptakaryaan
4. Bidang Bina Marga terdiri atas :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan substansi pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan:
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan substansi pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan substansi perencanaan dan pelaporan kebinamargaan.

5. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud terdiri atas :
 - a. Kelompok jabatan Fungsional Teknik Pengairan substansi pemanfaatan dan pengendalian sumber daya air
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Teknik Pengairan substansi operasi dan pemeliharaan sumber daya air
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Teknik Pengairan substansi perencanaan dan pelaporan sumber daya air.
6. Bidang Tata Ruang terdiri dari :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Penata Ruang substansi penataan ruang
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Penata Ruang substansi pengaturan dan pemanfaatan ruang
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Penata Ruang substansi pengendalian ruang
7. Bidang Pertanahan terdiri atas
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Penata Pertanahan substansi koordinasi pengadaan tanah;
 - b. Kelomok Jabatan Fungsional Penata Pertanahan substansi pendataan dan pendaftaran tanah
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Penata Pertanahan substansi penyelesaian masalah tanah.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
 KABUPATEN TANAH DATAR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
 NOMOR : 63 TAHUN 2021
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUJAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS BERTA TATA KERJA
 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN



BUPATI TANAH DATAR

td

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA TANAH DATAR
 AUDIA SANGI, S.H., M.Si
 NIP. 19770915 200003 2 001

B. Peran Strategis Dalam Pembangunan Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 – 2026 menetapkan bahwa visi pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun kedepan adalah untuk “

Makna pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dimaksud adalah:

Madani : adalah masyarakat Kabupaten Tanah Datar yang beradab dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, masyarakat demokratis serta maju dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Nilai-nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah : adalah kondisi dimana seluruh unsur pemerintah, lembaga, organisasi dan masyarakat secara bersama-sama mewujudkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau dalam setiap aktivitas kehidupan yang berlandaskan kepada ajaran agama Islam.

Kitabullah

Misi adalah rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam rangka upaya pencapaian visi dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya
2. Meningkatkan ekonomi masyarakat Kabupaten Tanah Datar dan perluasan lapangan kerja yang berbasis pertanian, industri dan UMKM
3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

4. Pembangunan pariwisata berkelanjutan yang berbasis adat, budaya dan sumberdaya alam.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien.
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan bertugas membantu kepala daerah dalam mewujudkan misi ke 6 yaitu :

Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk meningkatkan kualitas infrastuktur dan kualitas lingkungan hidup. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan melaksanakan peran strategis dalam pembangunan berkelanjutan disemua sektor infrastruktur, terutama bidang jalan, jembatan, irigasi, air minum dan sanitasi yang dilaksanakan secara berkelanjutan dan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah serta membuat kajian lingkungan, serta kajian sosial ekonomi sehingga pembangunan yang dilaksanakan berwawasan lingkungan dan mendukung pembangunan ekonomi daerah

C. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, serta mandat dan peran strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai Renstra, Prioritas Daerah, Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan informasi terkait pengukuran kinerja organisasi dan analisis atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2025, serta realisasi anggaran dikaitkan dengan pencapaian kinerja.

Bab IV Penutup

Berisi simpulan atas pencapaian kinerja, kendala, dan saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya

Lampiran

Berisi data-data lainnya yang diperlukan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Perencanaan Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 – 2026 yang menetapkan bahwa visi pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun kedepan adalah

“Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar Madani yang Berlandaskan Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah”.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan bertugas membantu kepala daerah dalam mewujudkan misi ke 6 yaitu :

Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan

Dalam mewujudkan pencapaian misi meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan menetapkan tujuan dan sasaran selama periode Renstra.

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan agar tujuan dan sasaran bisa dicapai, karena dengan mengetahui faktor-faktor kunci keberhasilan berarti dapat mengetahui apa kelebihan dan kekurangan untuk melaksanakan suatu tujuan dan sasaran.

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi. Tujuan disini adalah suatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Datar pada jangka waktu 5 (lima) tahun.

Tujuan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Datar konsisten dengan tugas pokok dan fungsi, yang secara kolektif menggambarkan arah strategik dinas dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas

Keterkaitan antara tujuan dan sasaran tergambar dalam table dibawah ini :

Tabel 1. Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Jangka Menengah
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	77,40	78,73	80,06	81,39	82,72	84,05
			Persentase jembatan berkondisi baik	81,48 %	85,10 %	85,86 %	90,00 %		87,90 %
		Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi	Persentase irigasi berkondisi baik	58,89	61,88	64,88	67,87	70,86	73,85
		Meningkatnya kuantitas jaringan air bersih	Persentase pelayanan air bersih	80,00	81,50	83,00	84,50	86,00	86,00
		Meningkatnya kuantitas jaringan sanitasi	Persentase Pelayanan Sanitasi	80,30	84,15	88,60	92,50	96,30	100,0
		Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukannya	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukannya	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
		Meningkatnya pengamanan aset tanah Pemda	Persentase pengamanan tanah aset pemda	100	100	100	100	100	100

B. Prioritas Daerah

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyusun program sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah secara konsisten untuk melaksanakan amanat Perundang-undangan dengan mengalokasikan anggaran untuk menunjang urusan wajib pelayanan dasar yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan berkewajiban memenuhi 2 (dua) Standar Pelayanan Minimal yaitu Pelayanan Air Minum dan Pelayanan Sanitasi.

Program dikategorikan strategis atau prioritas jika terkait langsung visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026, sedangkan program yang tidak terkait langsung dikategorikan sebagai program pendukung (*supporting*). Program-program tersebut disertai dengan kebutuhan pendanaan indikatif dan target kinerja terukur yang kemudian dijabarkan ke dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah. Pendanaan kegiatan disusun menggunakan prediksi kebutuhan belanja Perangkat Daerah berdasarkan target kinerja yang akan diwujudkan serta dengan mempertimbangkan persentase total belanja pada pengeluaran setiap Perangkat Daerah beberapa tahun sebelumnya. Sehingga persentase tersebut dapat dijadikan pagu pengeluaran khususnya untuk urusan strategis.

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas pokok dan fungsi mendukung tercapainya misi **Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan**, dengan melaksanakan program pembangunan daerah sebagaimana dengan tabel di bawah ini :

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												
					Tahun 1 (2021)		Tahun 2 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah	Meningkatnya panjang jalan dalam kondisi baik	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Terlaksananya program penyelenggaraan jalan	67,77	68,89	40,850,785,935	70,02	73,900,000,000	71	75,000,000,000	72	80,000,000,000	73	85,000,000,000	90,000,000,000		
		Penyelenggaraan Jalan Kab/Kota	Terlaksananya penyelenggaraan jalan kab/kota			40,850,785,935		73,900,000,000		75,000,000,000		80,000,000,000		85,000,000,000		90,000,000,000	
	Meningkatnya luas areal irigasi dalam kondisi baik	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			49,39	53	18,964,502,778	56	33,956,000,000	59	55,000,000,000	62	60,500,000,000	65	66,000,000,000	71,500,000,000	
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Air			599,999,615		3,956,000,000		5,000,000,000		5,500,000,000		6,000,000,000		6,500,000,000	
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Pada Daerah Irigasi yang Luasnya Di Bawah 1000 ha Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Pada Daerah Irigasi yang Luasnya Di Bawah 1000 ha					18,364,503,163		30,000,000,000		50,000,000,000		55,000,000,000		60,000,000,000	65,000,000,000
	Meningkatnya cakupan pelayanan air minum	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			79		8,507,609,600	80	6,000,000,000	81,5	7,000,000,000	83	7,500,000,000	84	8,000,000,000	86	8,500,000,000
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kab/Kota	Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (spam) di daerah kab/kota				8,507,609,600		6,000,000,000		7,000,000,000		7,500,000,000		8,000,000,000		8,500,000,000
	Meningkatnya jumlah rumah bersantasi layak	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Terlaksananya program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah				2,495,274,000		5,150,000,000		7,000,000,000		7,650,000,000		8,100,000,000		8,540,000,000
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kab/Kota	Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kab/kota				2,495,274,000		5,150,000,000		7,000,000,000		7,650,000,000		8,100,000,000		8,540,000,000
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAENASE	Terlaksananya program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase				474,981,521		7,000,000,000		7,230,000,000		7,550,000,000		7,860,000,000		8,000,000,000

		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Dalam Daerah Kab/Kota	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase			474,981,521		7,000,000,000		7,230,000,000		7,550,000,000		7,860,000,000		8,000,000,000
Meningkatnya penataan kawasan strategis		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Terlaksananya Program pengembangan permukiman			736,493,402		750,000,000		800,000,000		865,000,000		900,000,000		936,000,000
		Penyelenggaraan Infrastruktur Pada Permukiman Di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten / Kota	Terlaksananya penyelenggaraan Infrastruktur Pada Permukiman Di Kawasan Strategis			736,493,402		750,000,000		800,000,000		865,000,000		900,000,000		936,000,000
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Terlaksananya penataan bangunan gedung			3,432,994,709		500,000,000		500,000,000		550,000,000		600,000,000		660,000,000
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Terlaksananya Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			3,432,994,709		500,000,000		500,000,000		550,000,000		600,000,000		660,000,000
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Terlaksananya penataan bangunan dan lingkungannya			99,981,300		300,000,000		500,000,000		600,000,000		700,000,000		750,000,000
		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Terselenggaranya Penataan Bangunan dan Lingkungannya			99,981,300		300,000,000		500,000,000		600,000,000		700,000,000		750,000,000
Meningkatnya kualitas konstruksi		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Terlaksananya pengembangan jasa konstruksi			-	10 Badan Usaha	-	20 Badan Usaha	700,000,000	30 Badan Usaha	500,000,000	40 Badan Usaha	600,000,000	50 Badan Usaha	650,000,000
		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Terselenggaranya Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			-		-		250,000,000		250,000,000		300,000,000		300,000,000
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			-		-		300,000,000		100,000,000		100,000,000		150,000,000
		Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Terlaksananya Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi			-		-		150,000,000		150,000,000		200,000,000		200,000,000
Meningkatkan kesesuaian pola pemanfaatan ruang.	Meningkatnya jumlah pemanfaatan ruang yang sesuai	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Terlaksananya penyelenggaraan penataan ruang		95	289,999,250		4,300,000,000		4,900,000,000		5,600,000,000		5,850,000,000		6,250,000,000

	dengan RTRW	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Terlaksananya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota			49,999,825		200,000,000		300,000,000		500,000,000		500,000,000		550,000,000			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota			-		3,300,000,000		3,500,000,000		4,000,000,000		4,250,000,000		4,600,000,000			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			189,999,625		550,000,000		750,000,000		750,000,000		750,000,000		750,000,000			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			49,999,800		250,000,000		350,000,000		350,000,000		350,000,000		350,000,000			
Meningkatkan pengamanan tanah aset Pemda	Meningkatnya jumlah tanah aset pemda yang diamankan	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan																
		PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Terlaksananya pengelolaan izin lokasi					2	100,000,000		4	150,000,000		6	150,000,000	8	175,000,000	10	175,000,000
		Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksannay Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						100,000,000			150,000,000		150,000,000		175,000,000		175,000,000	
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Terlaksananya penyelesaian sengketa tanah garapan					49,999,575	100,000,000			150,000,000		150,000,000		175,000,000		175,000,000	
		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota					49,999,575	100,000,000			150,000,000		150,000,000		175,000,000		175,000,000	
		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Terlaksananya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan									150,000,000		185,000,000		200,000,000		235,000,000	
		Penyelesaian Masalah ganti Kerugian dan santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelesaian Masalah ganti Kerugian dan santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						-			150,000,000		185,000,000		200,000,000		235,000,000	

		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Terlaksananya redistribusi tanah serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee						150,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000
		Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				115,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000
		PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Terlaksananya penetapan tanah ulayat						150,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000
		Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/ Kota				-		150,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000
		PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Terlaksananya pengelolaan tanah kosong						225,000,000		250,000,000		275,000,000		325,000,000
		Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Terlaksananya Penyelesaian Masalah Tanah Kosong				-		75,000,000		100,000,000		100,000,000		125,000,000
		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Terlaksananya Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong				-		150,000,000		150,000,000		175,000,000		200,000,000
		PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Terlaksananya pengelolaan izin membuka tanah			570,000,000			1,000,000,000		1,250,000,000		1,500,000,000		1,750,000,000
		Penerbitan Izin Membuka Tanah	Terlaksananya Penerbitan Izin Membuka Tanah			570,000,000	17,200,000,000		1,000,000,000		1,250,000,000		1,500,000,000		1,750,000,000
		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Terlaksananya Penatagunaan Tanah						150,000,000		170,000,000		185,000,000		200,000,000
		Penggunaan Tanah Yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penggunaan Tanah Yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/ Kota						150,000,000		170,000,000		185,000,000		200,000,000

PROGRAM PENUNJANG	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten			20,421,871,080		17,660,000,000		13,180,000,000		14,090,000,000		16,290,000,000		15,600,000,000
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	8,999,700	100%	20,000,000	100%	30,000,000	100%	40,000,000	100%	40,000,000	100%	50,000,000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	7,892,734,755	100%	9,000,000,000	100%	9,500,000,000	100%	10,000,000,000	100%	10,500,000,000	100%	11,000,000,000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	12,648,000	100%	100,000,000	100%	150,000,000	100%	200,000,000	100%	250,000,000	100%	300,000,000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	154,176,375	100%	535,000,000	100%	600,000,000	100%	650,000,000	100%	700,000,000	100%	750,000,000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	100%	100%	-	100%	6,000,000,000	100%	500,000,000	100%	600,000,000	100%	2,000,000,000	100%	500,000,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	11,913,802,200	100%	305,000,000	100%	500,000,000	100%	600,000,000	100%	700,000,000	100%	800,000,000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	439,510,050	100%	1,700,000,000	100%	1,900,000,000	100%	2,000,000,000	100%	2,100,000,000	100%	2,200,000,000

C. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan program pembangunan daerah yang dituangkan dalam Renstra, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan menetapkan Indikator Kinerja Utama Dari sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, disusunlah Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
			(%)
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	69,99
2	Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi	Persentase Luas Areal Irigasi Dalam Kondisi Baik	60,74
		Persentase ketersediaan air irigasi	70,00
3	Meningkatnya cakupan pelayanan air minum	Akses Rumah Tangga terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan (%)	27,25
4	Meningkatnya kuantitas jaringan sanitasi	Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman (%)	6,15
5	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukannya	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukannya	90,00
6	Meningkatnya pengamanan aset tanah Pemda	Persentase tanah asset Pemda Yang bersertifikat	42,80
7	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	BB (70,10)
8	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	A (95,50)
9	Terwujudnya inovasi berkelanjutan	Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan	1
		Realisasi Perolehan Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi/Jalan/Irigasi	Rp6.191.640.000

D. Rencana Kerja dan Anggaran

Untuk mewujudkan target yang telah ditetapkan, didukung dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 4. Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Tahun 2025

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			8,932,426,697.00	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5,500,400.00	
1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	4,000,000.00	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	1,500,400.00	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7,347,995,054.00	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 orang	7,345,495,054.00	
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Dokumen	2,500,000.00	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Ket
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			5,000,000.00	
1.3.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 orang	5,000,000.00	
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah			342,046,104.00	
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket		
1.4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		
1.4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		
1.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Paket	10,000,000.00	
1.4.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	10,240,000.00	
1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	256,386,104.00	
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			252,488,100.00	
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	500,000.00	
1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	134,800,000.00	
1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	117,188,100.00	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Ket
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			979,397,039.00	
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	46 Unit	293,039,143.00	
1.6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	38,400,000.00	
1.6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	150,328,800.00	
1.6.5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	10 Unit	497,629,096.00	
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			3,713,600,700.00	
2.1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			968,471,800.00	
2.1.2	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	3 Unit	115,000,000.00	
2.1.3	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	6 Km	335,472,000.00	
2.1.4	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	0,7 Km	517,999,800.00	
2.2	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha			2,745,128,900.00	
2.2.2	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0,15 Km	1,173,931,000.00	90.81
2.2.3	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	10 Km	1.571.197.900.00	97.56

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Ket
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			323,214,400	
3.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			323,214,400	
3.1.1	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	10 SR	323,214,400	99,84%
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			6,221,640,000	
4.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			6,221,640,000	
4.1.1	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)		1 Dokumen	30,000,000	
4.1.2	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman	0,8 M ³ /Hari (400 SR)	6,191,640,000	
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			492,164,400	99.75%
5.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten			492,164,400	99.75%
5.1.1	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	2 Sistem Drainase Perkotaan	200,000,000	99.70%
5.1.2	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Sistem Drainase Perkotaan	292,164,400	99.79%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Ket
6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			4,206,830,700	99.86%
6.1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Setifikat Lain Fungsi Bangunan Gedung			4,206,830,700	99.86%
6.1.1	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	4,128,018,200	99.88%
6.1.2	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik dan Pendataan Bangunan Gedung Melalui SIMBG	Terselenggaranya Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	50 Dokumen	78,812,500	98.80%
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			8,072,763,900	
7.1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			8,072,763,900	
7.1.2.	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	3,5 Km	999,264,400	89.85%
7.1.4.	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	40 Unit	548,730,000	74.35%
7.1.5	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	1 Unit	612,870,000	97.92%
7.1.6	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	1 Dokumen DED	85,000,000	93.25%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Ket
7.1.7	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	1399 Km	200,000,000	99.28%
7.1.8	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	0,4 Km	2,503,430,000	99.32%
7.1.9	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	300 Km	1,819,204,500	99.89%
7.1.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan Yang Dipelihara Secara Rutin	0,75 Km	1,304,265,000	94.10%
8	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			2,746,948	0%
8.1	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			2,746,948	0%
8.1.1	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	0	2,746,948	0%
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			314,473,400	
9.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota			146,493,800	
9.1.1.	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RDTR yang disusun	0 Dokumen	146,493,800	53,73%
9.2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		113,079,600	
9.2.1	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	35 PKKPR	66,769,000	96,92%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Ket
9.2.2	Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang	Jumlah Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang yang diterbitkan	100 IPR	46,310,600	91,11%
9.3.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			54,900,000	
9.3.1	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	80 KRK	54,900,000	67,55%
II	URUSAN PERTANAHAN			307,570,000	
10	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE			10,000,000	99.66
10.1	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			10,000,000	99.66
10.1.1	Koordinasi penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten / Kota		1 Dokumen	10,000,000	99.66%
11	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH			235,470,000	99.39
11.1	Penerbitan Izin Membuka Tanah			235,470,000	99.39
11.1.1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	35 DOKumen	235,470,000	99.39

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Ket
12	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH			62,100,000	38.92
12.1	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota			62,100,000	38.92
12.1.1	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	62,100,000	38.92

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja

Dari hasil evaluasi APIP terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2024 masih terdapat beberapa kelemahan dengan rekomendasi sebagai berikut :

- a. Laporan kinerja triwulanan agar memuat evaluasi dan upaya/aktifitas yang akan dilakukan untuk mencapai kinerja.
- b. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah agar menginfokan penyebab keberhasilan ataupun hambatan dalam pencapaian kinerja.
- c. Hasil evaluasi internal yang dituangkan dalam notulen rapat agar menggambarkan tindak lanjut atas rekomendasi sebelumnya untuk perbaikan dan peningkatan kinerja.

Untuk rekomendasi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan telah melakukan tindak lanjut sebagai berikut:

- a. Laporan Kinerja Triwulan telah memuat evaluasi dan upaya yang dilakukan untuk mencapai target kinerja.
- b. Laporan Akuntabilitas Kinerja telah memuat informasi penyebab keberhasilan ataupun hambatan dalam pencapaian kinerja.
- c. Pada evaluasi internal dilakukan evaluasi terhadap tindak lanjut atas evaluasi sebelumnya untuk perbaikan dan peningkatan kinerja.

Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2025. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan merupakan kinerja tahun ke-4 pada periode Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan. Secara rata-rata tingkat capaian kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 90,95% yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategis.

Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
			(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	69,99	60,30	86,15
2	Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi	Persentase Luas Areal Irigasi Dalam Kondisi Baik	60,74	45,67	75,19
		Persentase ketersediaan air irigasi	70,00	70,00	100
3	Meningkatnya cakupan pelayanan air minum	Akses Rumah Tangga terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan	27,25	21,10	77,43
4	Meningkatnya kuantitas jaringan sanitasi	Jumlah penduduk dengan sanitasi layak	6,15	5,10	82,93
5	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukannya	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukannya	90,00	90	100%
6	Meningkatnya pengamanan aset tanah Pemda	Persentase tanah aset Pemda Yang bersertifikat	42,80	43	102.85

7	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	BB (70,10)	BB (70,25)	100
8	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	A (95,50)	81,67	85,51
9	Terwujudnya inovasi berkelanjutan	Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan	1	1	100
		Realisasi Perolehan Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi/Jalan/Irigasi	Rp6.191.640.000	Rp3.504.723.000	100
CAPAIAN RATA RATA					91,82%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat

- 1) Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 1 target;
- 2) Target dengan capaian realiasi tepat 100% sebanyak 4 target;
- 3) Target dengan capaian realiasi di bawah 100% sebanyak 6 target

Target dan realisasi kinerja tahun 2021-2025 dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel. 6. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2025 dan Target Akhir Renstra

No	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	2021			2022			2023			2024			2025		Target Akhir Renstra (2026)		
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian		
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	49.51 %	69.46%	69.36%	99.86%	70.28%	69.80%	99.32%	72.00%	70.28%	97.61%	81.39%	69.89%	85.87%	69.99 %	60,30 %	86,15%	80.00%	
2	Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi	Persentase irigasi berkondisi baik	41.42 %	80.00%	59.69%	74.61%	61.89%	54.65%	88.30%	64.10%	65.79%	102.64 %	71.29%	57.28%	80.35%	60.74 %	45,67 %	75,19%	73.85%	
3	Meningkatnya kuantitas jaringan air bersih	Persentase pelayanan air bersih	76.48 %	100.00 %	73.80%	73.80%	76.50%	75.55%	98.76%	76.50%	76.51%	100.01 %	80.50%	76.55%	95.09%	76.55 %	72.62 %	94.87%	84.72%	
4	Meningkatnya kuantitas jaringan sanitasi	Persentase Pelayanan Sanitasi	54.84 %	86.00%	75.67%	87.99%	76.10%	75.88%	99.71%	76.85%	75.05%	97.66%	78.05%	74.84%	95.89%	74.84 %	74.78 %	100%	82.66%	
5	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukannya	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukannya	52.00 %	70.00%	70.00%	100.00%	95.00%	90%	94.74%	95.00%	91%	95.31%	95.00%	93.00%	97.89%	90.00 %	90.00 %	100.00 %	95.00%	
6	Meningkatnya pengamanan aset tanah Pemda	Persentase pengamanan tanah aset pemda	0.00%	33.00%	35.33%	107.06%	39.89%	34.43%	86.31%	37.86%	40.66	107.40 %	44.15%	50.00%	113.25 %	42.80 %	43.00 %	102.85 %	58.81%	
7	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah								BB	B	96.57%	BB (70,10)	B (69,10)	97.92%	BB (70.10)	BB(70.25)	100%		
8	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat											97%	94,22	97.13%	9550.00%	8167.00%	85.51%		
9	Terwujudnya inovasi berkelanjutan	Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan								2	2	100%	1 (baru)	1	100%	1 Inovasi	1 Inovasi	100%		
				Capaian rata rata											95.93%				75.90%	

Dari Tabel 6 diatas, dapat dijelaskan capaian per indikator sebagai berikut :

Grafik. 1. Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Tahun 2021-2025



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa jalan berkondisi baik cenderung naik setiap tahunnya. Akan tetapi pada Tahun 2025 terjadi penurunan 9,59 %, hal ini disebabkan karena curah hujan yang tinggi dan terjadinya bencana alam banjir bandang dan longsor mengakibatkan kerusakan prasana dan sarana jalan. Target panjang jalan berkondisi baik pada akhir periode Renstra (Tahun 2026) adalah 80%. Dalam kurun waktu 2 (dua) sampai akhir periode Renstra, Dinas Pekerjaan Umum akan berupaya untuk meningkatkan kondisi jalan dan mempertahankan kondisi jalan baik sehingga panjang jalan berkondisi baik pada Tahun 2026 yaitu sepanjang 910.928 KM.

Grafik 2. Persentase Irigasi Berkondisi baik Tahun 2021-2025



Kondisi irigasi cenderung turun naik setiap tahunnya. Hal ini karena kondisi irigasi sangat dipengaruhi oleh curah hujan. Curah hujan yang tinggi menyebabkan terjadinya luapan sungai yang mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana irigasi, terutama terjadinya banjir lahar dingin dan banjir bandang pada Tahun 2024 dan 2025.

Grafik 3. Persentase Pelayanan Air Bersih Tahun 2021-2025



Pelayanan air bersih terus meningkat setiap tahunnya, akan tetapi di Tahun 2025 terjadi penurunan. Hal ini disebabkan karena adanya efisiensi anggaran dan laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi.. Pada akhir periode Renstra ditarget 84,72% dari jumlah rumah tangga sudah memiliki akses air bersih.

Grafik. 4. Persentase Pelayanan Sanitasi Tahun 2021-2025



Untuk layanan sanitasi terjadi penurunan setiap tahunnya karena laju pertumbuhan yang cukup tinggi.

Grafik 5. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Dengan Peruntukannya



Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukannya cenderung meningkat setiap tahunnya. Masih adanya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya, pada tahun 2025 terjadi penurunan pada capaian indikator ini. Untuk mencapai target dilakukan sosialisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) secara berkelanjutan.

Grafik 7. Persentase Pengamanan Tanah Aset Pemda



Untuk mengamankan tanah asset Pemda, dilakukan sertifikasi tanah asset Pemda secara bertahap. Jumlah tanah asset Pemda yang bersertifikat naik setiap tahunnya. Pada Tahun 2025 terjadi penurunan persentase karena bertambahnya jumlah tanah asset Pemda.

B. Analisis Capaian Kinerja

Sasaran Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan

Target indikator persentase panjang jalan dalam kondisi mantap yang ditetapkan Tahun 2025 adalah 69,99%, dengan formulasi penghitungan capaian sebagai berikut :

$$\frac{\text{Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik dan Sedang}}{\text{dibagi Panjang Jalan Kabupaten}} \times 100\%$$

Total panjang jalan Kabupaten adalah 1.138,66 km. Jalan dalam kondisi baik dan sedang sepanjang 686,61km. Jalan dalam kondisi rusak ringan sepanjang 318,6 km. Jalan dalam kondisi rusak berat sepanjang 133,45 km.

Target persentase jalan dengan kondisi baik Tahun 2025 adalah 69,89% dan realisasi 60,30% dengan tingkat capaian kerja 86,27%.

1. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

a. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

- Ketersediaan SDM aparatur yang memiliki integritas dan dedikasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, dan mampu melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi masing- masing dengan baik;
- Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan operasional kantor untuk menunjang kinerja SDM aparatur sehingga dapat melaksanakan tugas dengan optimal;
- Melaksanakan Kerjasama dengan Perangkat Daerah terkait atau instansi lain untuk menunjang keberhasilan target kinerja;
- Melakukan inovasi sesuai dengan tugas dan fungsi pokok Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;

b. Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya indikator persentase panjang jalan dalam kondisi baik adalah sebagai berikut:

- Sesuai Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, alokasi dana transfer bidang infrastruktur Kabupaten Tanah Datar mengalami pemotongan DAU Earmarked sebesar Rp. 1.915.191.468,00 dan Dana DAK Rp. 20.199.159.000,-
- Terjadinya bencana alam pada tahun 2024 dan 2025 yang mengakibatkan rusaknya infrastruktur di Kabupaten Tanah Datar dengan data sebagai berikut:
Jalan sepanjang 44 km
Jembatan sebanyak 3 Unit

- c. Upaya yang dilakukan untuk permasalahan ini adalah :
- Melakukan survey terhadap kondisi jalan untuk mengetahui kondisi existing jalan saat ini yang akan dijadikan dasar perencanaan di tahun selanjutnya agar bisa menentukan prioritas.
 - Melakukan pemeliharaan jalan secara rutin untuk mencegah kerusakan yang lebih berat.
 - Mengupayakan untuk mendapatkan program program pembangunan bidang jalan ke Pemerintah Pusat dan Provinsi

2. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam pencapaian indikator kinerja, dilakukan efisiensi dan optimalisasi sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada baik anggaran, sumber daya manusia, peralatan dan prasarana lainnya.
- b. Melakukan pekerjaan secara swakelola dengan memberdayakan SDM, peralatan, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan.

3. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Perjanjian Kinerja

- a. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur jalan adalah melaksanakan Program Penyelenggaraan Jalan. Program ini dilaksanakan melalui Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota dan diimplementasikan pada Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - Sub Kegiatan Rekonstruksi jalanMelalui sub kegiatan ini dilaksanakan Pengecoran Jalan SMK Bawah Potai Tanjung Baru, Jalan Piliang Dalimo Gantiang Ateh, Jalan Piliang Sani Gantiang Bawah,

Jalan Pemuda dari SD 08 Minang Kabau ke Lapangan Bola Kaki MinangKabau, Jalan Balai2 ke Balimbing, Rabat Beton Jalan Parak Gudang Dusun Balai Jum'at, Rabat Beton Jalan Parak Gudang Dusun Balai Jum'at, Perbaikan Jalan Jorong Mawar II (Tanjung Ungkang) dan Jalan Lurah Solok Nagari Singgalang.

➤ Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan

Pada Sub kegiatan ini dilaksanakan Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Simp. Tigo Jangko - Batas Kab. Sijunjung.

➤ Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan

Pada Sub Kegiatan ini dilakukan pemeliharaan 28 unit jembatan.

➤ Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan

Pada Sub Kegiatan ini dilakukan rehabilitasi Jembatan Cocang Jorong Rajo Dani , Jembatan Lubuak Tapuak, Jembatan Pincuran 7 dan Jembatan Gelanggang.

➤ Pembangunan Jembatan

Pada Sub Kegiatan ini dilaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan Jembatan Lubuk Pauh.

➤ Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan /Jembatan ,

Pada sub kegiatan ini dilaksanakan penyusunan Dokumen Kondisi jalan dan jembatan kewenangan Kabupaten sebagai dasar perencanaan tahun berikutnya.

➤ Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan

Pada Sub kegiatan ini dilaksanakan rehabilitasi 15 ruas jalan sepanjang 2,250 Km.

➤ Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan

Pada sub kegiatan ini dilaksanakan pemeliharaan rutin jalan kabupaten sepanjang 463,41 Km,

Dari hasil analisis diatas, hasil capaian kinerja adalah sebagai berikut :

No	Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Kriteria
	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	69,99%	60,30%	86,15%	Sangat Baik

Dokumentasi Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten



Ruas Simp Tigo Jangko - Bts Kab Sijunjung Kec Lintau Buo



Jembatan Cocang Nagari Padang Ganting

Sasaran : Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi

Indikator keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi adalah Persentase Luas Areal Irigasi Dalam Kondisi Baik dengan Formulasi Penghitungan :

Luas Daerah Irigasi Dalam Kondisi Baik dibagi
Luas Daerah Irigasi Kabupaten X100%

Luas areal irigasi Kabupaten adalah 29.585,40 Ha. Target persentase luas areal irigasi dalam kondisi baik tahun 2025 adalah 70% . Realisasi luas areal irigasi yang berkondisi baik 42,87 % atau 12,683.10 Ha dengan tingkat capaian 57,28 % .

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

- a. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :
 - Ketersediaan SDM aparatur yang memiliki integritas dan dedikasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, dan mampu melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi masing- masing dengan baik;

- Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan operasional kantor untuk menunjang kinerja SDM aparatur sehingga dapat melaksanakan tugas dengan optimal;
 - Melaksanakan Kerjasama dengan Perangkat Daerah terkait atau instansi lain untuk menunjang keberhasilan target kinerja;
 - Melakukan inovasi sesuai dengan tugas dan fungsi pokok Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
- b. Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya indikator persentase panjang jalan dalam kondisi baik adalah sebagai berikut:
- Sesuai Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, alokasi dana transfer bidang infrastruktur Kabupaten Tanah Datar mengalami pemotongan DAU Earkmarked sebesar Rp1.915.191.468,00 dan Dana DAK Rp. 20.199.159.000,-
 - Terjadinya bencana alam pada tahun 2024 dan 2025 yang mengakibatkan rusaknya jaringan irigasi dan tanggul sungai dan pendangkalan sungai akibat tertimbun material.
- c. Upaya yang dilakukan untuk permasalahan ini adalah :
- Mengoptimalkan tenaga penjaga pintu air, melakukan pembinaan terhadap petani pemakai air untuk pemeliharaan jaringan irigasi permukaan.
 - Mengupayakan untuk mendapatkan program program pembangunan bidang jalan ke Pemerintah Pusat dan Provinsi

2. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam pencapaian indikator kinerja, dilakukan efisiensi dan optimalisasi sebagai berikut :

- Mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada baik anggaran, sumber daya manusia, peralatan dan prasarana lainnya.
- Meningkatkan pemeliharaan dan operasi jaringan irigasi untuk mengantisipasi terjadinya terhambatnya layanan jaringan irigasi
- Melakukan pekerjaan secara swakelola dengan memberdayakan SDM, peralatan, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan.

3. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Perjanjian Kinerja

Untuk menunjang keberhasilan Indikator Persentase Luas Areal Irigasi Dalam Kondisi Baik dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), dengan Kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan
 - Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Lainnya
Pada kegiatan ini telah dilaksanakan pemeliharaan Embung Koto Baru, Embung Padang Siminyak dan Embung Talago Paninjauan.
 - Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai,
Output sub kegiatan ini berupa normalisasi restorasi sungai Batang Silambiak, Batang Aia Gadang, Batang Gholan, Batang Sibilahan/Sibinuang, Batang Muaro Samuik, Batang Malalo, Batang Lembang dan pengerukan sedimen Daerah Irigasi Bandar Padang Ganting.

- Sub Kegiatan Rehabilitasi Tanggul Sungai
Output Sub Kegiatan ini berupa rehabilitasi tanggul Sungai Batang Solok, Batang Sigarungguang, Batang Sibilah-bilahan, Batang Parik dan Batang Pangian.
- b. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan sistem Irigasi Primer dan sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
Output sub kegiatan ini berupa rehabilitasi jaringan irigasi Daerah Irigasi Bandar Basiku, Daerah Irigasi Guguak Lelo, Daerah Irigasi Bandar Layah, Daerah Irigasi Bandar Pulang, Daerah Irigasi Bandar Nan Gadang.
 - Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
Output sub kegiatan ini berupa operasi dan pemeliharaan Daerah Irigasi sepanjang 52,5 Km.

Dari hasil analisis diatas, hasil capaian kinerja adalah sebagai berikut :

No	Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Kriteria
1	Persentase Luas Areal Irigasi Dalam Kondisi Baik	60,74	45,67	75,19	Baik
2	Persentase ketersediaan air irigasi	70,00	70,00	100	Memuaskan

Dokumentasi Rehabilitasi Jaringan Irigasi



D.I. Bandar Basiku

Sasaran : Meningkatnya cakupan pelayanan air minum

Indikator keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya cakupan pelayanan air minum adalah : Persentase akses rumah tangga terhadap sumber air minum jaringan perpipaan, yang diukur dengan formulasi penghitungan :

Jumlah Rumah Tangga yang mendapat akses terhadap sumber air minum jaringan perpipaan
dibagi Jumlah Rumah Tangga X 100%

Target capaian persentase akses rumah tangga terhadap sumber air minum jaringan perpipaan Tahun 2025 adalah 27,25%. Jumlah Rumah Tangga di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 adalah 128.385 dan yang sudah mendapatkan akses terhadap sumber air minum jaringan perpipaan adalah 27.089 atau 21,10 % Tingkat capaian kinerja adalah 77,43%. Tingkat capaian yang tidak terealisasi 1001% disebabkan oleh terjadinya bencana alam hidrometeorologi pada Bulan November 2025 yang mengakibatkan kerusakan jaringan air minum perpipaan.

1. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan
 - a. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :
 - Ketersediaan SDM aparatur yang memiliki integritas dan dedikasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, dan mampu melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi masing- masing dengan baik;
 - Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan operasional kantor untuk menunjang kinerja SDM aparatur sehingga dapat melaksanakan tugas dengan optimal;
 - Melaksanakan Kerjasama dengan Perangkat Daerah terkait atau instansi lain untuk menunjang keberhasilan target kinerja;
 - Melakukan inovasi sesuai dengan tugas dan fungsi pokok Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
 - b. Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya indikator Meningkatnya cakupan pelayanan air minum adalah sebagai berikut:
 - Sesuai Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, alokasi dana transfer bidang infrastruktur Kabupaten Tanah Datar mengalami pemotongan DAU Earkmarked sebesar Rp. 1.915.191.468,00 dan Dana DAK Rp. 20.199.159.000,-
 - Terjadinya bencana alam pada tahun 2024 dan 2025 yang mengakibatkan rusaknya sarana air bersih dengan data sebagai berikut:

No	Uraian Kerusakan	Lokasi
1	Bak Penampung 2 unit rusak	Jorong Baiang Dusun Kanang Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuh Selatan
2	Pipa 3" sepanjang 2000 m	
3	Pipa 2" sepanjang 1800 m	
4	Bak Penampung 1 unit	Jorong Baiang Dusun Tanjung Jua Pudung Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuh Selatan
5	Pipa 2" sepanjang 1600 m	
6	Bak Penampung 1 unit	Jorong Duo Koto Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuh Selatan
7	Pipa 3" sepanjang 1800 m	
8	Pipa 2" sepanjang 1500 m	
9	Pipa 3" sepanjang 1100 m	Jorong Guguak Nagari Guguak Malalo, Kecamatan Batipuh Selatan
10	Pipa 2" sepanjang 1800 m	
11	Pipa 3" sepanjang 1700	Jorong Tigo Suko, Nagari Paninjauan, Kecamatan X Koto
12	Pipa 3 " sepanjang 2500 m	Nagari Tambangan, Kecamatan X Koto
13	Bak Rusak	
14	Bak Intake Rusak	Jorong Pagu-Pagu Nagari Pandai Sikek, Kecamatan X Koto
15	Pipa 3" sepanjang 1000 m	
16	Bak Penampung Rusak	Pamsimas Gunung Bungsu, Nagari Batipuh Baruah, Kecamatan X Koto
17	Pipa 3" sepanjang 2100 m	
18	Broncaptering Kap 5 liter/detik, Reservoar, IPA, Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi	Jorong Muaro Ambius Nagari Guguak Malalo
19	Broncaptering Kap 5 liter/detik, Reservoar, IPA, Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi	Jorong Suduik Nagari Sumpu

- c. Upaya yang dilakukan untuk permasalahan ini adalah :
- Mengupayakan untuk mendapatkan program program pembangunan bidang jalan ke Pemerintah Pusat dan Provinsi
 - Meningkatkan pembinaan terhadap KP SPAM
 - Meningkatkan koordinasi dengan Unit Pengelola Air Minum Daerah (PDAM)

Dari hasil analisis diatas, hasil capaian kinerja adalah sebagai berikut :

No	Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Kriteria
1	Persentase akses rumah tangga terhadap sumber air minum jaringan perpipaan	27,25%	21,10%	77,43%	Baik

Dokumentasi Kegiatan SPAM



Sambungan Rumah SPAM

Sasaran : Meningkatnya kuantitas jaringan sanitasi

Indikator capaian sasaran meningkatnya kuantitas jaringan sanitasi adalah Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak, yang diukur dengan menggunakan formulasi penghitungan :

$$\frac{\text{Jumlah rumah tangga dengan akses sanitasi aman}}{\text{Jumlah Rumah Tangga}} \times 100\%$$

Target persentase Jumlah rumah tangga dengan akses sanitasi aman Tahun 2025 adalah 6,15%. Jumlah rumah tangga 128.385 dan yang sudah memiliki akses sanitasi aman sebanyak 6,554 atau 5,10%. Tingkat capaian kinerja adalah 82,92%. Target capaian kinerja yang tidak terealisasi 100 % karena laju pertumbuhan penduduk Tahun 2025 yang cukup tinggi.

Dari hasil analisis diatas, hasil capaian kinerja adalah sebagai berikut

No	Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Kriteria
1	Jumlah penduduk dengan sanitasi aman	6,15	5,10	82,92	Sangat baik



Sasaran 5 Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukannya

Indikator sasaran meningkatnya Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukannya adalah persentase kesesuaian pemanfaatan ruang yang diukur dengan formulasi penghitungan :

$$\frac{\text{Jumlah pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Peruntukannya}}{\text{Jumlah pemanfaatan ruang}} \times 100\%$$

Target indikator persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukannya tahun 2025 adalah 90% dan kondisi saat ini kesesuaian pola pemanfaatan ruang baru mencapai 90,00%. Tingkat capaian realisasi 100%. Hal ini karena masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya penataan ruang, sehingga masih terdapat rumah atau kawasan permukiman yang dibangun di lahan sawah dan kawasan hutan.

Dari hasil analisis diatas, hasil capaian kinerja adalah sebagai berikut

No	Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Kriteria
1	Meningkatnya Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukannya	90	90	100%	Sangat baik

Sasaran 6 Meningkatnya pengamanan aset tanah Pemda

Indikator sasaran meningkatnya pengamanan tanah aset Pemda adalah persentase pengamanan tanah aset Pemda, yang diukur dengan formulasi penghitungan :

$$\frac{\text{Jumlah Pengamanan Tanah Aset Pemda}}{\text{Jumlah Tanah Aset Pemda}} \times 100\%$$

Target persentase pengamanan tanah aset Pemda Tahun 2025 adalah 42,80%. Jumlah tanah aset pemda 1.432 persil . Pada akhir

Tahun 2025 tanah asset Pemda yang sudah bersertifikat sebanyak 615 persil atau 43%. Tingkat capaian indikator ini adalah 100,47%.

No	Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Kriteria
1	Meningkatnya pengamanan tanah aset Pemda	42,80	43	100,47%	Sangat baik

Sasaran 7 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Indikator sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah adalah Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan target Tahun 2025 BB (70,10) dan hasil yang dicapai predikat BB (70,25)

No	Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Kriteria
1	meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	BB (70,10)	BB (70,25)	100,00%	Sangat baik

Sasaran 8 : Indeks Kepuasan Masyarakat

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil Survey Kepuasan Masyarakat dengan target Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 adalah 95,50. Dari hasil survey kepuasan masyarakat yang telah dilaksanakan pada Tahun 2025, Indeks Kepuasan Masyarakat memperoleh nilai 81,67.

No	Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Kriteria
1	Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat	95,50	81,67	85,52	Sangat baik

Sasaran 9 Terwujudnya inovasi berkelanjutan

Indikator sasaran terwujudnya inovasi berkelanjutan adalah inovasi yang dikembangkan dengan target 1 inovasi, yaitu DIRUANGDATA

yang merupakan media informasi, sosialisasi dan edukasi tentang penataan ruang yang ditujukan kepada semua pengguna ruang di Kabupaten Tanah Datar sekaligus sebagai sarana pelayanan publik berbasis geospasial dan monitoring aktivitas perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. DIRUANGDATA dibangun melalui kerjasama antara Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar. Dasar pembentukan DIRUANGDATA adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2042.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2025 tidak bisa terealisasi 100 % dari target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan tingginya curah hujan dan terjadinya bencana alam, mengakibatkan kerusakan infrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi, prasarana dan sarana air bersih dan sanitasi, juga menimbulkan kerusakan dan pendangkalan sungai.

C. Akuntabilitas Keuangan/Realisasi Anggaran

Adapun realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Jalan Kabupaten

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur jalan adalah melaksanakan Program Penyelenggaraan Jalan dengan anggaran Rp8.072.763.900 (delapan milyar tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tiga

ribu sembilan ratus rupiah) dan realisasi Rp7.713.987.179 (tujuh milyar tujuh ratus tiga belas juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh Sembilan rupiah) atau 95,56%. Program ini dilaksanakan melalui Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1) Rekonstruksi Jalan

Pada Sub Kegiatan ini telah dilaksanakan Pengecoran Jalan SMK Bawah Potai Tanjung Baru, Jalan Piliang Dalimo Gantiang Ateh, Jalan Piliang Sani Gantiang Bawah, Jalan Pemuda dari SD 08 Minang Kabau ke Lapangan Bola Kaki MinangKabau, Jalan Balai2 ke Balimbing, Rabat Beton Jalan Parak Gudang Dusun Balai Jum'at, Rabat Beton Jalan Parak Gudang Dusun Balai Jum'at, Perbaikan Jalan Jorong Mawar II (Tanjung Ungkang) dan Jalan Lurah Solok Nagari Singgalang. dengan anggaran Rp999.264.000 (Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan realisasi Rp897.796.900 (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) (89,85%) dan realisasi fisik 100%.

2) Rehabilitasi Jalan

Pada Sub Kegiatan ini telah dilaksanakan rehabilitasi 15 ruas jalan sepanjang 2,250 Km dengan anggaran Rp2.503.430.000 (dua milyar lima ratus tiga juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) realisasi Rp2.486.375.780 (dua milyar empat ratus delapan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) atau 99,32% dan realisasi fisik 100%.

3) Pemeliharaan Rutin Jalan

Pada Sub Kegiatan ini telah dilaksanakan pemeliharaan rutin jalan kabupaten sepanjang 463,41Km, dengan anggaran Rp1.819.204.500 (satu milyar delapan ratus sembilan belas juta dua ratus empat ribu lima ratus rupiah) realisasi Rp1.817.070.407 (satu milyar delapan ratus tujuh belas juta tujuh puluh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) atau 99,88% dan realisasi fisik 100%.

4) Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan /Jembatan

Pada Sub Kegiatan ini telah dilaksanakan Penyusunan Dokumen Data Kondisi Jalan dan Jembatan di Kabupaten Tanah Datar, dengan anggaran Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan realisasi Rp198.555.646 (seratus Sembilan puluh delapan juta lima ratus lima puluh lima ribu enam ratus empat puluh enam rupiah) atau 99,28% dan realisasi fisik 100%. Dokumen ini sangat penting untuk pedoman perencanaan tahun berikutnya dan persyaratan usulan permintaan Dana Alokasi Khusus.

5) Pemeliharaan Rutin Jembatan

Pada Sub Kegiatan ini telah dilaksanakan pemeliharaan 28 unit jembatan. dengan anggaran Rp548.730.000 (lima ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), realisasi Rp407.512.657 (empat ratus tujuh juta lima ratus dua belas ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah) atau 74,26% dan realisasi fisik 80%.

6) Rehabilitasi Jembatan

Pada Sub Kegiatan ini telah dilaksanakan rehabilitasi Jembatan Cocang Jorong Rajo Dani , Jembatan Lubuak Tapuak, Jembatan Pincuran 7 dan Jembatan Gelanggang dengan anggaran Rp612.870.000 (enam ratus dua belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan realisasi Rp600.084.089 (enam ratus juta delapan puluh empat ribu delapan puluh Sembilan rupiah) atau 97,91% dan realisasi fisik 100%.

7) Pembangunan Jembatan

Pada Sub Kegiatan ini telah dilaksanakan Penyusunan Dokumen Lingkungan Jembatan Lubuk Pauh, dengan anggaran Rp85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) dan realisasi Rp79.265.300 (tujuh puluh sembilan juta dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus rupiah) atau 93,25% dan realisasi fisik 100%.

8) Pemeliharaan Berkala jalan

Pada sub kegiatan ini telah dilaksanakan pemeliharaan berkala jalan Ruas Simp. Tigo Jangko - Batas Kab. Sijunjung Rp

1.304.265.000 (satu miliar tiga ratus empat juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) realisasi Rp1.227.326.400 (satu miliar dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah) atau 94,10% dan realisasi fisik 100%.

2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air

Upaya yang dilakukan untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi adalah melalui Program Pengelolaan Sumber Daya Air dengan anggaran Rp3.713.600.700, (tiga milyar tujuh ratus tiga belas juta enam ratus ribu tujuh ratus rupiah) dan realisasi anggaran Rp3.555.804.363, (tiga milyar lima ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) atau 95,80% dengan 2 (Dua) Kegiatan yaitu:

1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran Pada program Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp968.471.800 (Sembilan ratus enam puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah realisasi Rp958.988.435 (Sembilan ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) atau 99,02% realisasi fisik 100% dengan Sub Kegiatan:

1) Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Lainnya.

Pada Sub Kegiatan ini telah dilaksanakan Embung Koto Baru, Embung Padang Siminyak dan Embung Talago Paninjauan, dengan anggaran Rp115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah) dan realisasi Rp112.794.938 (seratus dua belas juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu Sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) atau 98,08% dan realisasi fisik 100%

2) Normalisasi/Restorasi Sungai,

Pada Sub kegiatan ini telah dilaksanakan normalisasi dan restorasi Batang Silambiak, Batang Aia Gadang, Batang Gholan, Batang Sibilahan/Sibinuang, Batang Muaro Samuik, Batang Malalo, Batang Lembang dan pengerukan sedimen Daerah Irigasi Bandar Padang Ganting dengan anggaran Rp335.472.000 (tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan realisasi Rp331.467.990 (tiga ratus tiga puluh satu juta empat ratus enam puluh tujuh ribu Sembilan ratus sembilan puluh rupiah) atau 98,81% dan realisasi fisik 100%.

3) Sub Kegiatan Rehabilitasi Tanggul Sungai

Pada Sub kegiatan ini telah dilaksanakan perbaikan tanggul Sungai Batang Solok, Batang Sigarungguang, Batang Sibilah-bilahan, Batang Parik dan Batang Pangian, dengan anggaran Rp517.999.800 (lima ratus tujuh belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) dan realisasi Rp514.725.507 (lima ratus empat belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) atau 99,37% dan realisasi fisik 100%.

2. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan sistem Irigasi Primer dan sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) daerah Kabupaten /Kota, dengan Sub Kegiatan :

1) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan

Pada Sub Kegiatan ini telah dilaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi Daerah Irigasi Bandar Basiku, Daerah Irigasi Guguak Lelo, Daerah Irigasi Bandar Layah, Daerah Irigasi Bandar Pulang, Daerah Irigasi Bandar Nan Gadang dengan anggaran Rp1.173.931.000 (satu milyar seratus tujuh puluh tiga juta Sembilan puluh tiga satu ribu rupiah) dan realisasi Rp1.066.039.600 (satu milyar enam puluh enam juta tiga

puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah) atau 90,81% dan realisasi fisik 100%.

2) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan

Pada Sub Kegiatan ini telah dilaksanakan operasi dan pemeliharaan 52,5 Km, dengan anggaran Rp1.571.197.000 (satu milyar lima ratus tujuh puluh satu juta serratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dan realisasi Rp 1.532.776.328 (satu milyar lima ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) atau 97,55% dan realisasi fisik 100%.

3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai sasaran Meningkatkan kuantitas jaringan air bersih adalah melaksanakan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan anggaran Rp323.214.000 (tiga ratus dua puluh tiga juta dua ratus empat belas ribu rupiah) realisasi Rp322.705.816 (rupiah) atau 99,84%, realisasi fisik 100% dengan Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan :

1). Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan

Pada sub kegiatan ini telah dilaksanakan penambahan pembangunan 7 Sambungan Rumah (SR) SPAM di Nagari Tanjung Bonai dengan anggaran Rp323.214.000 (tiga ratus dua puluh tiga juta dua ratus empat belas ribu rupiahrupiah) realisasi Rp322.705.816 (tiga ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima ribu delapan ratus enam belas rupiah) atau 99,84%, realisasi fisik 100%

4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Upaya yang dilakukan untuk mencapai sasaran Meningkatkan kuantitas jaringan sanitasi direalisasikan melalui pelaksanaan

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp6.221.640.000 (enam milyar dua ratus dua puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), realisasi Rp. 6.208.316.466 (enam milyar dua ratus delapan ribu tiga ratus enam belas ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) atau 99,79% dengan Sub Kegiatan:

1) Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumur Tinja (IPLT)

Pada sub kegiatan ini telah dilaksanakan penyusunan Dokumen Feasability Study IPLT dengan anggaran Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) realisasi Rp29.997.072 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh puluh dua rupiah) atau 99,99% realisasi fisik 100%

2) Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman

Pada kegiatan ini telah dilaksanakan Pengadaan Buis Beton dan Penutup Buis Beton, Tangki Septik Pabrikasi dan pembangunan Jamban dan Bilik Skala Individual di 16 Nagari dengan Anggaran Rp6.191.640.000 (enam milyar seratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) realisasi Rp6.178.319.394 (enam milyar seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus sembilan belas ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) atau 99,78% dan realisasi fisik 100%

5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Anggaran Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Rp492.164.400 (empat ratus sembilan puluh dua juta seratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah), realisasi Rp490.947.060 (empat ratus sembilan puluh dua juta Sembilan ratus empat puluh tujuh ribu enam puluh rupiah) atau 99,75% dan realisasi fisik 100% dengan Kegiatan

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan:

1) Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan

Pada sub kegiatan ini telah dilaksanakan pembangunan Drainase Jalan Kampung Baru - Talago Sianak Nagari Tigo Jangko dan Drainase Jalan Lingkar Talago Pakih Nagari Tabek Patah., dengan anggaran Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), realisasi Rp199.393.660 (seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus enam puluh rupiah) puluh delapan atau 99,70% dan realisasi fisik 100%.

2) Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase

Pada sub kegiatan ini telah dilaksanakan pemeliharaan drainase di Kawasan Kota Batusangkar sepanjang 3100 m dengan anggaran Rp292.164.400 (dua ratus sembilan puluh dua juta seratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah), realisasi Rp291.553.400 (dua ratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh tiga ribu empat ratus rupiah) atau 99,79% dan realisasi fisik 100%.

6. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dilaksanakan untuk meningkatkannya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukannya, dengan anggaran Rp314.473.400 (tiga ratus empat belas juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah),- realisasi Rp222.700.200 (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus ribu dua ratus rupiah) atau 70,82%,

- 1) Program Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota, melalui Sub Kegiatan Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota telah dilaksanakan pengadaan peralatan pendukung berupa 1 (satu) unit drone dan 1 (satu) unit GPS dengan anggaran Rp146.493.800 (seratus empat puluh enam juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu

delapan ratus rupiah), realisasi Rp78.707.300 (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah) atau 53,73%

- 2) Koordinasi dan Sosialisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota, anggaran pada Kegiatan ini Rp113.079.600 (seratus tiga belas juta tujuh puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) realisasi Rp106.907.600 (seratus enam juta sembilan ratus tujuh ribu enam ratus rupiah) atau 94,54 % dengan sub kegiatan:

- a. Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Pada kegiatan ini telah dilaksanakan penerbitan 43 PKKPR, dengan anggaran Rp66.769.000 (enam puluh enam juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), realisasi Rp64.714.100 (enam puluh empat juta tujuh ratus empat belas ribu seratus rupiah) atau 96,92%.

- b. Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang

Pada kegiatan ini telah dilaksanakan penerbitan 149 IPR dengan Anggaran Rp46.310.600 (empat puluh enam juta tiga ratus sepuluh ribu enam ratus rupiah) realisasi Rp42.193.000 (empat puluh dua juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

- 3) Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota dengan sub kegiatan Koordinasi pelaksanaan penataan ruang.

Pada kegiatan ini telah dilaksanakan penerbitan 73 Keterangan Rencana Kota (KRK) dengan anggaran Rp54.900.000 (lima puluh empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) realisasi Rp37.085.300 (tiga puluh tujuh juta delapan puluh lima ribu tiga ratus rupiah) atau 67,55% realisasi fisik 91,25%

7. Program Penataan Bangunan Gedung

Program Penataan Bangunan Gedung dilaksanakan dengan anggaran Rp4.206.830.700 (empat milyar dua ratus enam juta delapan ratus tiga puluh tujuh ratus rupiah), realisasi Rp4.199.744.035 (empat milyar seartus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tiga puluh lima rupiah), atau 99,83% realisasi fisik 97,50%. Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Lain Fungsi Bangunan Gedung, pada Sub Kegiatan :

1) Pemeliharaan, Perawatan dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

Pada sub kegiatan ini telah dilaksanakan Sub Kegiatan Pemeliharaan, Perawatan dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Output sub kegiatan ini berupa Pembangunan 5 Unit Bangunan Gedung, Rehabilitasi 5 Unit Bangunan, Pemeliharaan 5 Unit Bangunan Penataan Lokasi Pujasera di Eks TK Bayangkari Batusangkar, Pembangunan Pelataran Polres TD, , Rehabilitasi Lapangan Bola Kaki Ladang Koto Sungaitarab, Pematangan Lahan PAUD, Penyusunan DED UPT PPA, AMDAL Lalin Sekolah Rakyat, Pematangan Lahan Rencana Lokasi Sekolah RakyAT, Penyusunan Dokumen UKL/UPL Sekolah Rakyat, Pembangunan Pagar dan Toilet Pujasera Eks TK Bhayangkari dengan anggaran Rp. 4.128.018.200 (empat milyar seratus dua puluh delapan juta delapan belas ribu dua ratus rupiah), realisasi Rp.4.121.875.135 (empat milyar seratus dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu seratus tiga puluh lima rupiah) atau 99,85% dan realisasi fisik 97,89%.

2) Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik dan Pendataan Bangunan Gedung Melalui SIMBG. Pada Sub kegiatan ini telah dilaksanakan penerbitan 64 Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), 127 rekomendasi teknis (Rekomtek), persetujuan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan gedung dan 12 Berita Acara Sidang Konsultasi Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG) dengan anggaran Rp78.812.500 realisasi Rp77.868.900 atau 98,80% realisasi Fisik 95,50%

8. Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee

Dengan Kegiatan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota. Pada kegiatan ini telah dilaksanakan inventarisasi Tanah Objek Reforma Agraria dengan anggaran Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) realisasi Rp9.966.100 (sembilan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu seratus rupiah) atau 99,66% realisasi fisik 100%

9. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah

Program Pengelolaan Izin Membuka dengan Kegiatan Penerbitan Izin Membuka Tanah pada Sub Kegiatan :

Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah Pada sub kegiatan ini telah dilaksanakan penerbitan 70 sertifikat tanah aset pemda dengan anggaran Rp235.470.000 (dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), realisasi Rp229.664.030 (dua ratus dua puluh Sembilan juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga puluh rupiah) atau 97,53% dan realisasi fisik 162%,

10. Program Penatagunaan Tanah

Program Penatagunaan Tanah melalui Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu daerah Kabupaten/Kota, pada Sub Kegiatan:

Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota.

Pada Sub Kegiatan ini telah dilaksanakan survey penyusunan zona nilai tanah dengan anggaran Rp62.100.000 (enam puluh dua juta seratus ribu rupiah), realisasi Rp24.169.250 (dua puluh empat juta seratus enam puluh sembilan dua ratus lima puluh rupiah) 38,92% dan realisasi fisik 100%.

Untuk menunjang pelaksanaan Program dan Kegiatan, juga dilaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp8.932.426.697 (rupiah), realisasi Rp8.407.800.740 (rupiah) atau 94,13% dan realisasi fisik 95,83% dengan Kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Output Sub Kegiatan ini berupa penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA dan RKAP) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA dan DPPA), dengan anggaran Rp4.000.000 (empat juta rupiah), realisasi Rp3.585.000 (tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) atau 89,63% dan realisasi fisik 100%.
 - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Output Sub Kegiatan ini berupa Dokumen LKPJ, LPPD, LKJiP dan SPM dengan anggaran Rp1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah), realisasi Rp1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah) atau 99,97% , realisasi fisik 100%.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN output sub kegiatan ini berupa pembayaran gaji dan tunjangan 65 ASN dengan anggaran Rp7.345.495.054 (tujuh miliar tiga ratus empat puluh lima juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu lima puluh empat rupiah), realisasi Rp6.892.383.767 (enam miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) atau 93,83% dan realisasi fisik 100%.

2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Pada sub kegiatan ini telah dilaksanakan penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Semester dan Laporan Keuangan Akhir Tahun dengan anggaran Rp2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah), realisasi Rp2.458.000 (dua juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah) atau 98,32% dan realisasi fisik 100%.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pada sub kegiatan ini telah dilaksanakan Diklat Teknis bagi 10 orang ASN dengan anggaran Rp5.000.000 (lima juta rupiah) realisasi Rp3.930.000 (tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) atau 78.60% dan realisasi fisik 100%.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Pada sub kegiatan ini telah dilaksanakan penyediaan instalasi listrik kantor dan penggantian bola lampu dengan anggaran Rp2.924.000 (dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) , realisasi Rp1.998.000 (saju juta sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) atau 68,33% dan realisasi fisik 100%.

- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan output sub kegiatan ini berupa tersedianya alat tulis kantor, dengan anggaran Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), realisasi Rp48.424.971 (empat puluhdelapan juta empat ratus dua puluh empat ribu Sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah) atau 96,85% dan realisasi fisik 100%.
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Pada sub kegiatan ini telah dilaksanakan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dokumen dengan anggaran Rp12.496.000 (dua belas juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) dan realisasi Rp12.495.816 (dua belas juta empat ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus enam belas rupiah) atau 100% dan realisasi fisik 100%.
- 4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Pada sub kegiatan ini telah dilaksanakan penyediaan Surat Kabar selama 9 bulan dengan anggaran Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), realisasi Rp8.980.000 (delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) atau 89,80% dan realisasi fisik 100%.
- 5) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
Pada sub kegiatan ini telah dilaksanakan penyediaan makanan dan minuman tamu dengan anggaran Rp.10.240.000 (sepuluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), realisasi Rp9.490.000 (sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu) atau 92,68% dan realisasi fisik 100%.
- 6) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pada sub kegiatan ini telah dilaksanakan rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah dengan anggaran Rp256.386.104 (dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh enam ribu seratus empat rupiah), realisasi Rp248.387.904 atau 96,88% dan realisasi fisik 100%.

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Pada sub kegiatan ini telah dilaksanakan pembayaran air, listrik, telfon dan internet dengan anggaran Rp134.800.000 dan realisasi Rp125.395.347 atau 93,02% dan realisasi fisik 100%.

2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pada sub kegiatan ini telah dilaksanakan penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor serta pembayaran 4 (empat) orang tenaga jasa lainnya dengan anggaran Rp117.188.100, realisasi Rp87.287.000 atau 74,48% dan realisasi fisik 100%

3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Pada sub kegiatan ini telah dilaksanakan penyediaan materai 10.000 sebanyak 50 buah, dengan anggaran Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), realisasi Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) atau 100% dan realisasi fisik 100%.

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pada sub kegiatan ini telah dilaksanakan penyediaan pembayaran pajak 30 Unit Kendaraan Dinas/Operasional Roda Dua, 11 Unit Roda Empat dan 5 Unit Kendaraan Roda Enam serta Penggantian Suku Cadang, Service dan BBM 30 Unit Kendaraan Dinas/Operasional Roda Dua, 13 Unit Roda Empat dan 1 Unit Kendaraan Roda Enam serta pembayaran 2 (dua) orang tenaga jasa lainnya dengan anggaran Rp293.039.143 realisasi Rp279.456.224 atau 100% dan realisasi fisik 100%.

2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pada sub kegiatan ini telah dilaksanakan perbaikan 6 (enam) unit laptop, 4 (empat) unit printer, dan 7 (tujuh) unit AC, kalibrasi alat ukur dan pembelian perangkat kelengkapan alat

kuat tekan beton dengan anggaran Rp38.400.000 realisasi Rp37.389.000 atau 100% dan realisasi fisik 100%.

3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Pada sub kegiatan ini telah dilaksanakan perbaikan dan pengecatan 3 (tiga) unit gedung kantor Dinas Pekerjaan Umum serta pembayaran belanja jasa 2 (dua) orang tenaga jasa lainnya dengan anggaran Rp150.328.000 dan realisasi RP148.278.906 atau 100% dan realisasi fisik 100%.

4) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar

Pada Sub kegiatan ini anggaran sebesar Rp497.629.096 realisasi Rp495.860.005 atau 100% realisasi fisik 100%

Secara umum, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan bisa melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan anggaran yang Rp32.587.431.145 (tiga puluh dua milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh satu ribu seratus empat puluh lima rupiah), realisasi Rp31.387.805.239 (tiga puluh satu milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus lima dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) atau 96,32%.

BAB IV P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 mengacu kepada Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026

Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah bertujuan untuk :

- Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Aparatur
- Sebagai wujud nyata komitmen
- Sebagai dasar penilaian dan pemberian penghargaan dan sanksi
- Dasar evaluasi kinerja aparatur
- Sebagai dasar untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi
- Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai

Berdasarkan analisis dan evaluasi yang telah dilaksanakan dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Penetapan Indikator Perjanjian Kinerja Tahun 2024 mempedomani RPJMD Tahun 2021-2026.
2. Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sesuai target yang telah direncanakan
3. Dari perhitungan rata rata pencapaian sasaran kinerja yang diperoleh dapat direalisasikan 93,50% dapat dikategorikan sangat baik
4. Keberhasilan peningkatan capaian kinerja Tahun 2025 dapat diraih karena adanya dukungan dari pimpinan dan seluruh jajaran

B. SARAN

Untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang, disarankan sebagai berikut :

- 1) Perbaiki dokumen perencanaan
- 2) Penetapan target capaian yang tepat
- 3) Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait
- 4) Melakukan monitoring secara berkala kinerja
- 5) Memanfaatkan monitoring dengan menggunakan teknologi informasi
- 6) Memperkuat kualitas evaluasi SAKIP internal